

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo, "Politik Lokal dan Otonomi Daerah", (Bandung : Alfabeta, 2014),
- Ashofa, Burhan, "Metode Penelitian Hukum." (Jakarta : Rineka Cipta, 2001)
- Bagus, Lorens, "Kamus Filsafat", (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002),
- Basri, Faisal H, "Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi", (Jakarta : Trio Rimba Persada, 2003),
- Busroh, Abu Daud, Ilmu Negara, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990),
- Fahmi Amrusi dan Ni'matull Huda, "Hukum Pemerintah Daerah", (Bandung : Nusamedia, 2012),
- HR, Ridwan, "Hukum Administrasi Negara", (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)
- Huda, Ni'matul, "Hukum Pemerintahan Daerah", (Bandung : Nusa Dua, 2017),
- Idrus, Muhammad, "Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", (Yogyakarta. UII Press : 2007).
- Ismatullah, Dedy, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, (Bandung : Pustaka Setia, 2010),
- Munir, Sirojul, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas dan Aktualisasinya, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2013),
- Rasyid, M. Ryaas, "Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002),
- Sarundajang, "Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah", (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999),
- Siswanto.Sunarno, "Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia" (Jakarta : Sinar Grafika, 2005),

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013),

Sri Rahayu, Ani, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya (Malang : Sinar Grafika, 2018),

Teguh Yuwono, “Pengantar Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru”, (Semarang, CLGAPPS Diponegoro University, 2001.)

Tim Pedoman Buku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. “Buku Pedoman Fakultas Hukum Edisi Revisi 2011.” (Semarang : Universitas Diponegoro, 2011),

Widjaja, HAW. “Otonomi Daerah dan Daerah Otonom” (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),

Jurnal Hukum:

Andhika Satya Pratama, Dwi Poernomo, Henny Juliani, Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Asas Pelayanan yang Baik Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Kota Semarang, (Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016)

Amalia Dimantina, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien, (Masalah-Masalah Hukum Volume 39, Nomer 1, Tahun 2010)

Ane Permatasari, Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi penyelesaian masalah perbatasan Indonesia, (Media Hukum, Volume 21, Nomor 2, Tahun 2014)

Christine Ayu Setyaningrum, Retno Saraswati dan Indarja, Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Masalah-Masalah Hukum Volume 6, Nomor 2 Tahun 2017)

H.M Laica Marzuki, Hakikat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI,
(Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2007)

Muhammad Zaenuddin, Wahyudi Kumorotomo, Samsubar Saleh, Agus Heruanto
Hadna, Identifikasi Permasalahan Pasca Diterapkan Otonomi Daerah Di Kota
Batam Dan Alternatif Solusi Kebijakan Mendatang, (Seminar Nasional
Cendekiawan Ke 4, Hukum, Politik, Manajemen, Ekonomi, Akuntansi,
Konseling, Desain dan Seni Rupa, Buku 2, Tahun 2018)

Peraturan Perundang-Undang:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten, Kuatan Singingi dan
Kota Batam

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 Tentang Bonded Warehouse

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Kotamadya
Batam di Wilayah Propinsi Tingkat I Riau

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Hubungan Kerja antara
Kotamadya Batam dan Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 tahun 2005 Tentang Pemekaran Perubahan
dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam

Website:

https://www.academia.edu/8164733/Sejarah_Singkat_BATAM, diakses tanggal 13 November 2019.

<https://batampos.co.id/2018/05/11/penjelasan-pemko-batam-mengapa-batam-perlu-kek/> diakses tanggal 8 Maret 2020.

https://ftzbbk.bpb Batam.go.id/index.php/home/layan_detail/018001 diakses tanggal 30 April 2020.

<https://investor.id/archive/dualisme-pengelolaan-batam-rugikan-pajak-rp20-triliun> diakses tanggal 30 April 2020.

https://jdih.batam.go.id/?page_id=500 diakses tanggal 28 April 2020.

LAMPIRAN